

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Bandung, pengangguran menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan serius. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Kota Bandung menghadapi tantangan besar dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang pesat, arus migrasi, serta keterbatasan kesempatan kerja sering kali menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memiliki peran sentral dalam upaya penanggulangan pengangguran. Dinas ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pencari kerja, serta mendorong partisipasi sektor swasta dalam penyediaan lapangan kerja. Melalui berbagai program dan inisiatif, Dinas Tenaga Kerja berusaha mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sering kali menjadi pertanyaan. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti

keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta *responsivitas* pasar tenaga kerja terhadap program yang dijalankan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut guna memahami sejauh mana keberhasilan dan kendala yang dihadapi.

Kota Bandung, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam penanggulangan pengangguran. Pengangguran di Kota Bandung merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menggambarkan masalah pengangguran di Kota Bandung:

1. Tingginya Tingkat Urbanisasi

Bandung mengalami urbanisasi yang pesat, dengan banyaknya penduduk yang pindah dari daerah pedesaan ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menambah tekanan pada pasar tenaga kerja yang sudah padat, meningkatkan persaingan untuk pekerjaan yang terbatas.

2. Keterbatasan Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Sektor-sektor seperti industri kreatif dan pariwisata, meskipun berkembang, belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung seluruh tenaga kerja.

3. Ketidakcocokan Keterampilan

Sering kali terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini mengakibatkan banyak lulusan pendidikan formal tidak bisa langsung terserap di pasar kerja karena tidak memiliki keterampilan yang relevan.

4. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi pengangguran di Kota Bandung. Banyak usaha kecil dan menengah yang tutup atau mengurangi karyawannya, serta penurunan aktivitas ekonomi secara umum yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran.

5. Keterbatasan Program Pelatihan dan Penempatan Kerja

Meskipun Dinas Tenaga Kerja telah mengadakan berbagai program pelatihan dan penempatan kerja, jumlah dan cakupan program tersebut sering kali belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua pencari kerja. Selain itu, kualitas pelatihan yang diberikan juga menjadi sorotan, apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.

6. Teknologi dan Automasi

Perkembangan teknologi dan otomatisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pekerjaan tradisional yang tergantikan oleh mesin dan teknologi baru, sementara tenaga kerja belum sepenuhnya siap beradaptasi dengan perubahan ini.

7. Sektor Informal

Sebagian besar tenaga kerja di Bandung bekerja di sektor informal yang tidak terdata dengan baik, seperti pedagang kaki lima, pekerja lepas, dan usaha kecil lainnya. Pekerjaan di sektor informal ini sering kali tidak stabil dan tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks Kota Bandung, kebijakan terkait penanggulangan pengangguran dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Wali Kota (Perwal). Berikut penjelasan mengenai masing-masing instrumen tersebut

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden. UU memiliki cakupan nasional dan mengatur hal-hal yang bersifat umum dan fundamental dalam berbagai bidang, termasuk ketenagakerjaan.

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Mengatur tentang hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan pekerja.
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Mengatur berbagai aspek yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan investasi, termasuk perubahan pada ketentuan ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur,

Bupati, atau Wali Kota) untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Perda berfungsi untuk mengatur hal-hal yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Pengangguran: Perda ini mengatur kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah kota untuk mengurangi angka pengangguran, termasuk pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan kerjasama dengan sektor swasta.

Peraturan Wali Kota (Perwal) adalah peraturan yang dibuat oleh Wali Kota untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU atau Perda. Perwal memiliki cakupan yang lebih spesifik dan teknis, berfungsi sebagai panduan pelaksanaan kebijakan di tingkat kota.

Perwal Kota Bandung No. 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bursa Kerja: Perwal ini mengatur tata cara penyelenggaraan bursa kerja di Kota Bandung, termasuk prosedur, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tersebut.

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pengangguran dalam konteks penanggulangan pengangguran di Kota Bandung, kebijakan yang diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja melibatkan berbagai program yang sesuai dengan UU, Perda, dan Perwal yang berlaku. Misalnya:

- Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, Perda tentang Penanggulangan Pengangguran, dan Perwal terkait pelatihan kerja.

- Penyelenggaraan Bursa Kerja: Mengacu pada Perwal tentang Bursa Kerja yang menetapkan prosedur dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Dukungan terhadap UKM dan Wirausaha: Berdasarkan UU Cipta Kerja yang mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum tersebut, Dinas Tenaga Kerja dapat menjalankan kebijakan yang komprehensif dan terarah untuk mengatasi masalah pengangguran di Kota Bandung. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala juga diperlukan agar program-program yang dijalankan tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan yang ada.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Kota Bandung

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuk (TPT)
2021	11,46%
2022	9,55%
2023	8,83%

(Sumber BPS)

Masalah ketenagakerjaan memang sangat luas dan kompleks, tercakup dimensi ekonomis, dimensi social dan dimensi social politik. Pembangunan ketenagakerjaan mencakup penyediaan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga harus dibangun sistem pelatihan kerja, sistem informasi pasar kerja dan sistem antar kerja. Perluasan kesempatan kerja diperlukan

karena dengan kesempatan kerja dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah ketenagakerjaan yang lain meliputi permasalahan dalam pengupahan dan jaminan sosial. Penetapan upah minimum, syarat syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan industrial, serta hubungan dan kerja sama internasional masalah ketenagakerjaan tersebut sangat kompleks, mencakup berbagai aspek. Namun sayang, kompleksitas masalah ketenagakerjaan tersebut kurang disadari dan kurang mendapat perhatian pimpinan pemerintah karena permasalahan tersebut dipandang hanya sebagai hasil ikutan dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga yang di tekankan dan di kejar hanya laju pertumbuhan.

Secara umum masalah ketenagakerjaan memang sangat luas dan kompleks, mencakup permasalahan informasi dan perencanaan tenaga kerja, antar kerja daerah dan penempatan di luar negeri, pelatihan dan produktifitas kerja. Masalah ketenagakerjaan juga mencakup syarat-syarat kerja termasuk jam kerja dan waktu istirahat, upah dan jaminan sosial, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan produktifitas perusahaan, penyelesaian perselisihan, perlindungan tenaga kerja, kebebasan berserikat, perluasan kesempatan kerja untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja khususnya tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia pada umumnya dan di Kota Bandung pada khususnya, dapat dikatakan cukup besar untuk itu perlu disampaikan

tentang bagaimana perspektif empirik pengangguran di Indonesia khususnya Kota Bandung. untuk bisa mendapatkan kebijakan yang ideal yang seharusnya digunakan atau di implementasikan.

Masalah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih tinggi dan diperkirakan akan terus meningkat. Tingginya tingkat pengangguran ini disebabkan salah satunya oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum dapat menciptakan lapangan kerja baru, selain itu tingkat pengangguran di Indonesia mengalami berbagai perubahan dari tahun 2020 hingga 2023, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan global.

Pada tahun 2020 Pandemi COVID-19 yang mulai merebak di awal tahun 2020 memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan yang harus mengurangi jumlah pekerjanya atau bahkan tutup karena adanya pembatasan aktivitas dan penurunan permintaan. Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik drastis menjadi 7,07%, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, Tahun 2021 dengan mulai dilonggarkannya pembatasan dan diperkenalkannya berbagai program stimulus ekonomi oleh pemerintah, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Program seperti Kartu Prakerja dan berbagai insentif untuk sektor usaha kecil dan menengah membantu menciptakan lapangan kerja baru. TPT turun menjadi 6,49% pada tahun 2021, meskipun masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pra-pandemi, Tahun 2022 pemulihan ekonomi berlanjut di tahun 2022, dengan berbagai sektor ekonomi mulai bangkit kembali. Peningkatan investasi dan ekspor juga membantu memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja. Pada tahun ini, TPT turun lagi menjadi 5,83%,

mendekati tingkat pengangguran sebelum pandemi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan yang lebih baik, Sedangkan pada Tahun 2023, ekonomi Indonesia mulai stabil meskipun masih menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia dan perubahan iklim. Pemerintah fokus pada pengembangan infrastruktur dan sektor teknologi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun, TPT sedikit meningkat menjadi 5,86% pada Februari 2023. Peningkatan ini bisa jadi disebabkan oleh masuknya lebih banyak angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan.

Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia

Tahun	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)
2020	7,07
2021	6,49
2022	5,83
2023	5,86

(Sumber BPS)

Data tersebut menunjukkan fluktuasi TPT di Indonesia selama periode 2020-2023. Ada penurunan yang signifikan dari tahun 2020 ke 2021, dan tren menurun terus hingga 2022 sebelum mengalami sedikit peningkatan pada 2023.

Dengan besarnya AK yang tidak di imbangi dengan peningkatan kesempatan kerja maka jumlah pengangguran semakin meningkat kondisi ini seharusnya mendapatkan perhatian yang serius mengingat daya dukung

perekonomian dan sumber daya alam semakin terbatas sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat jumlah angkatan kerja pun senantiasa meningkat dari tahun ke tahun oleh karena itu pemerintah harus membangun kembali kesempatan kerja dengan mempersiapkan seluruh masyarakatnya dengan memberi perhatian, keterampilan dan kapasitas untuk memberi kontribusi kepada pekerjaan dan pelayanan masyarakat. Sedikitnya pekerjaan yang tersedia bagi sarjana dari pada yang dibutuhkan menyebabkan para sarjana ini bersaing dengan SMU.

Sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah angkatan kerjapun senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, oleh karena itu pemerintah harus membangun kembali kesempatan kerja dengan mempersiapkan seluruh masyarakatnya dengan memberi perhatian, keterampilan dan kapasitas untuk memberi kontribusi kepada pekerjaan dan pelayanan masyarakat. Sedikitnya pekerjaan yang tersedia bagi sarjana daripada yang dibutuhkan menyebabkan para sarjana saat ini bersaing dengan lulusan SMU untuk pekerjaan pekerjaan dengan keterampilan rendah. Angkatan kerja meningkat disetiap sektor, termasuk tersier dan peningkatan produktifitas dengan beberapa standar memberikan rangsangan bagi perekonomian.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu strategi untuk mengatasi pengangguran adalah penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya. Namun untuk menciptakan kerja yang banyak ada berbagai kendala yang sangat kompleks baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah penciptaan kesempatan kerja diantaranya yang penting adalah masih sulitnya arus masuk modal asing sehingga iklim investasi di Indonesia

masih harus di perbaiki. Untuk menggairah iklim investasi, maka pemerintah mengeluarkan inpres Nomor 03 Tahun 2006 tentang Paket perbaikan iklim investasi.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka kajian tentang implementasi kebijakan ketenagakerjaan dalam mengurangi angka pengangguran, masih menarik untuk di teliti. Oleh karenanya penulis bermaksud untuk mengkaji secara ilmiah, kebijakan ketenagakerjaan dilihat dari sudut implementasi kebijakan sebagai salah satu upaya pengurangan angka pengangguran di Kota Bandung mulai tahun 2020 sampai dengan 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya kejelasan langkah-langkah pemerintah dalam pengambilan kebijakan, sehingga yang perlu dijadikan sebagai rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana persepsi pegawai Disnaker Kota Bandung terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan pengangguran yang diterapkan?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Disnaker Kota Bandung dalam implementasi kebijakan penanggulangan pengangguran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan :

1. Mengevaluasi Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pengangguran yang Diterapkan oleh Disnaker Kota Bandung.

2. Mengidentifikasi Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Pengembangan Teori dan Pengetahuan

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang kebijakan penanggulangan pengangguran dan implementasinya di tingkat kota, Memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan penanggulangan pengangguran.

2. Metodologi Penelitian

Menyediakan contoh penerapan metode kualitatif dalam studi kebijakan publik, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa di masa depan, Menggali lebih dalam pendekatan kualitatif dalam mengevaluasi program pemerintah dan memahami dinamika yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

3. Bahan Ajar dan Studi Kasus

Penelitian ini dapat digunakan sebagai studi kasus dalam mata kuliah terkait kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia, dan ekonomi tenaga kerja, Menyediakan bahan ajar yang relevan dan kontekstual bagi mahasiswa yang mempelajari isu-isu pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peningkatan Kebijakan dan Program Disnaker Kota Bandung

Memberikan masukan berharga bagi Disnaker Kota Bandung untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan pengangguran, Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan inovasi untuk mengoptimalkan hasil program.

2. Strategi Penanggulangan Pengangguran

Menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat pengangguran secara lebih efektif, Mendorong pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja dan masyarakat.

3. Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan

Menyediakan panduan bagi peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, Memperkuat sinergi antar-stakeholder untuk mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan pengangguran.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Membantu Disnaker dalam merancang program dan layanan yang lebih tepat sasaran dan efektif bagi pencari kerja, Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan pengangguran.

5. Penguatan Kapasitas Pegawai Disnaker

Memberikan wawasan bagi pegawai Disnaker tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan, yang dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan internal.